



**Kajian Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Manajemen Krisis: Pembelajaran dari Situasi Pasca Konflik**

**Muhammad Diwanul Mujahidin, Muhammad Turhan Yani, Harmanto**

Universitas Negeri Surabaya

[muhammaddiwanul.23016@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammaddiwanul.23016@mhs.unesa.ac.id); [muhammadturhan@unesa.ac.id](mailto:muhammadturhan@unesa.ac.id);

[harmanto@unesa.ac.id](mailto:harmanto@unesa.ac.id).

Informasi artikel	ABSTRAK
Diterima November 2024 Revisi Desember 2024 Dipublikasikan Januari 2025	Konflik diidentifikasi sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Konflik juga bisa bermuatan negatif jika menimbulkan perpecahan. Sehingga diperlukan berbagai pendekatan kewarganegaraan sebagai salah satu upaya dalam menghadapi suasana pasca konflik. Artikel ini mengkaji strategi manajemen krisis, dengan menekankan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan yang mengambil pelajaran dari situasi pasca konflik. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mengelola pembelajaran saat terjadinya krisis pasca konflik. Hal ini juga bertujuan sebagai tanggung jawab akademis lingkungan pendidikan, khususnya dalam konteks kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode scoping literature review. Hasil penelitian memaparkan bahwa penerapan pendidikan kewarganegaraan yang inklusif, pendekatan berbasis komunitas, serta integrasi nilai-nilai perdamaian dan toleransi merupakan strategi yang berhasil dalam mengatasi tantangan di situasi pasca konflik. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi manajemen krisis yang efektif dalam pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan perdamaian dan stabilitas sosial.
<b>Keywords :</b> Pendidikan Kewarganegaraan; Konflik; Manajemen Krisis.	<b>ABSTRACT</b> <i>A Study of the Role of Civic Education as Crisis Management: Learning from Post-Conflict Situations.</i> Conflict is identified as an unavoidable form of social interaction in people's lives. Conflict can also be negatively charged if it causes division. Thus, various civic approaches are needed as one of the efforts in dealing with the post-conflict atmosphere. This article examines crisis management strategies, emphasizing the important role of civic education that draws lessons from post-conflict situations. The purpose of this research is to identify and analyze effective approaches in managing learning during a post-conflict crisis. It also aims to be an academic responsibility of the educational environment, especially in the context of citizenship. This research uses a scoping literature review method. The results show that the application of inclusive citizenship education, community-based approaches, and the integration of peace and tolerance values are successful strategies in overcoming challenges in post-conflict situations. The article concludes that effective crisis management strategies in civic education can contribute significantly to peace building and social stability.
<b>How to Cite :</b> Mujahidin dkk., (2025). Kajian Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Manajemen Krisis: Pembelajaran dari Situasi Pasca Konflik. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , 10(1), pp. 51-61. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp51-61">http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp51-61</a>	

✉ **Alamat korespondensi:**

Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana Pendidikan IPS, Surabaya, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

✉ **E-mail:** [muhammaddiwanul.23016@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammaddiwanul.23016@mhs.unesa.ac.id); [muhammadturhan@unesa.ac.id](mailto:muhammadturhan@unesa.ac.id); [harmanto@unesa.ac.id](mailto:harmanto@unesa.ac.id).

Copyright © 2025 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Gejolak konflik yang terjadi di berbagai belahan negara masih menjadi isu penting dunia sosial. Berbagai upaya invasi dan gencatan

senjata yang masif tentu berdampak pada sebuah negara. Seperti konflik yang terjadi seperti Rusia dan Ukraina yang bermula pada tahun 2014 dan memuncak pada tahun 2022, di

mana terjadi serangan Rusia terhadap kota-kota besar di Ukraina memicu reaksi keras dari komunitas internasional (Pattipeilhy & Sitompul, 2022).

Selain itu berbagai konflik juga terjadi di antara Israel dan Palestina, konflik yang terjadi telah menyebabkan jutaan warga Palestina diusir dari tempat kelahirannya dalam skala besar dengan durasi panjang. Kasus konflik berkepanjangan Palestina sebagai salah satu problem yang paling lama dan terbesar dalam sejarah dunia (Rasyid, 2022).

Konflik antara Israel-Palestina juga menjadi sorotan publik dalam menegakkan hak-hak asasi manusia, terutama perlindungan hak anak. Anak dikategorikan sebagai salah satu bagian warga sipil yang tidak terlibat dalam peperangan, mereka termasuk golongan yang memperoleh perlindungan. Hal ini mencakup penghormatan terhadap kepribadian, hak keluarga, kekayaan, dan praktik keagamaan mereka, sehingga mereka juga memiliki hak untuk hidup dan berpendidikan (Putra dkk., 2022).

Konflik lain yang melibatkan peran serta anak juga terjadi di Yaman, diketahui bahwa setidaknya terdapat 1.500 kasus perekrutan anak menjadi tentara dalam Perang Yaman sejak tahun 2015. Konflik bersenjata non-internasional ini terjadi dengan persetujuan dalam satu negara, antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak yang terorganisir masing-masing berada dalam satu komando (Rahadyan dkk., 2024).

Berbagai permasalahan terkait hak anak dan keterlibatannya dalam sebuah konflik di sebuah negara tentu telah melanggar hukum pada masing-masing negara. Penegakan dan pelaksanaan hak dasar ini perlu diperkuat dengan kewajiban tiap masing-masing negara untuk melaksanakan pemeliharaan. Penjaminan hak-hak dasar semua individu pada wilayah teritorial dan yurisdiksinya tanpa adanya diskriminasi (Hadju, 2019).

Alternatif untuk mengatasi situasi konflik semakin memburuk, maka dilakukanlah upaya dalam manajemen krisis. Pelaksanaan manajemen krisis menjadi suatu elemen krusial dalam konteks pasca konflik. Dampak pasca konflik cenderung kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan, dalam situasi pasca konflik. Masyarakat sering kali menghadapi tantangan berat seperti trauma

psikologis, hilangnya tempat tinggal mereka, ketidakpercayaan antar kelompok, dan disintegrasi sosial. Konsep manajemen krisis yang dibawa oleh (Nato, 2022) menunjukkan bahwa manajemen krisis difokuskan untuk pencegahan krisis. Kesepakatan ini mengadopsi pendekatan menyeluruh dan menyatakan bahwa Aliansi akan terus berusaha mencegah dan merespons krisis.

Pendidikan kewarganegaraan telah memberi ruang dan dasar yang bersifat kokoh dalam proses mengembangkan pola pikir kritis dan aktif dalam perubahan sosial yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, *human right*, dan kesetaraan (Sudirman & Sukasani, 2024). Pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tren kontroversial yang muncul dengan sikap yang konstruktif dan bertanggung jawab (Harahap dkk., 2023).

Terdapat berbagai penelitian terkait peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. Peran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya fokus pada konsep-konsep bernegara, tetapi juga mendidik tentang cara menjadi warga negara yang baik, sehingga pembelajaran PPKn sangat memungkinkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas moral bangsa Indonesia (Atmaja & Salahuddin, 2022).

Peran guru PKn juga tidak kalah penting dalam melakukan pembentukan karakter disiplin siswa. Seperti membiasakan siswa berpikir kritis, menghargai teman, dan bersikap saling menghormati. Guru juga harus mendorong siswa untuk belajar dengan rajin, berkonsentrasi selama proses belajar, berperilaku baik terhadap guru, teman, dan masyarakat sekitar, menaati peraturan sekolah, serta mengikuti pembelajaran dengan tertib (Rifki, 2022).

Perkembangan implementasi pendidikan kewarganegaraan di era global saat ini sangat penting untuk dikembangkan demi membangun moral yang kuat terhadap kemanusiaan global (Dakhi, 2023; Isa & Dewi, 2021). Pada era masifnya informasi yang beragam, masyarakat juga harus mempertahankan nasionalisme mereka, peran pendidikan kewarganegaraan tentu memiliki posisi sentral, terutama untuk menanamkan nilai kebangsaan, cinta bangsa

dan membentuk karakter *good citizenship* (Imelda Saskia, 2023).

Penelitian ini memiliki fokus dan kebaharuan dalam hal memahami bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan diterapkan dalam konteks kebangsaan setiap negara, serta dapat melakukan proses mengidentifikasi efektivitasnya sebagai upaya membentuk pola pikir kritis dan dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang bermoral dan berintegritas. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh berbagai sistem pendidikan kewarganegaraan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan *scoping literature review*, dimana peneliti melakukan anotasi terhadap berbagai sumber-sumber penelitian yang relevan dan melakukan analisis menggunakan pendekatan dan teori tertentu dalam pendekatan pendidikan, penelitian bertujuan untuk menggambarkan peranan pendidikan kewarganegaraan dan gambaran pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Dunia sebagai upaya “manajemen krisis dalam pendidikan kewarganegaraan”. Metode *scoping literature review* menjadi salah satu tinjauan yang bertujuan untuk menyintesis hasil penelitian secara komprehensif dan sistematis, pendekatan ini digunakan untuk memetakan konsep utama, sumber bukti, dan kesenjangan penelitian dalam suatu bidang studi tertentu (Agus dkk., 2023).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki nilai urgensi dalam upaya pembentukan manusia yang kritis, berpengetahuan, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan dan proses pembelajaran kewarganegaraan, siswa diajarkan mengenai pemenuhan tugas mereka sebagai warga negara sesuai dengan nilai luhur bermasyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi gagasan yang mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, hal ini tentu akan mendorong siswa untuk melakukan analisis terhadap isu-isu sosial dan politik secara mendalam dan membantu generasi muda dalam

menghadapi tantangan global dan tren kontroversial dengan sikap yang konstruktif dan etis. Sehingga peserta didik akan terbentuk karakter dan kesadaran sosial yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis, beberapa peran pendidikan kewarganegaraan juga dapat dianotasikan pada Tabel 1

Tabel 1. Anotasi Jurnal Peran Pendidikan Kewarganegaraan

No	Identitas Jurnal
1.	(Widiatmaka, 2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di dalam membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. <i>Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.</i> , 5(1), 1–10.
2.	(Harahap dkk., 2023). Menanamkan Kritisisme Konstruktif di Perguruan Tinggi: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengelola Tren Kontroversial Mahasiswa. <i>Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran</i> , 8(1), 173–181.
3.	(Aulia & Dewi, 2021). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Generasi Muda. <i>Jurnal Kewarganegaraan</i> , 5(1), 268–275.
4.	(Vandita & Taufik, 2023). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Generasi Muda. <i>NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan</i> , 4(2), 290–297.
5.	(Varelaswi, 2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai penanaman Pendidikan Karakter Siswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme. <i>Proceedings Series of Educational Studies National Conference from Magister of Education Management</i> , 5, 153–160.
6.	(Rachmawaty, 2023). Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus Bangsa. <i>Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)</i> , 1(1), 34–42.
7.	(Jannah dkk., 2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Sekolah Damai di Tengah-Tengah

- Kehidupan Masyarakat Pluralis. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5266–5274.
8. (Hasanah dkk., 2022). Kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 1(3), 289–292.
  9. (Gole & Marianta, 2024). Pancasila Sebagai Paradigma Penyelesaian Konflik Pembunuhan Massal Tahun 1966 di Maumere, Flores Timur. *Civic Society Research and Education*, 2, 14–26.
  10. (Sytrisno dkk., 2021). Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 43–54.
- 

Pendidikan kewarganegaraan dibentuk dengan tujuan membentuk karakter pemuda agar menjadi seseorang yang memiliki nilai luhur Pancasila, sebuah landasan falsafah negara Republik Indonesia, yang terdiri dari lima nilai utama, yaitu religiusitas, mengutamakan nilai kemanusiaan, menghargai persatuan, bangsa yang menekankan nilai kerakyatan bersandar pada nasionalisme, serta bangsa yang senantiasa melaksanakan keadilan (Widiatmaka, 2022).

Pendidikan warganegara tentu harus diajarkan dalam pendidikan juga mampu menjadi pola pembentuk pemikiran kritis seseorang, hal ini ditunjukkan oleh penelitian (Harahap dkk., 2023) bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadikan mahasiswa menunjukkan respons positif terhadap tugas-tugas yang memerlukan pemikiran kritis dan memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Mereka melihat tugas-tugas ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan analitis dan berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik terkait kewarganegaraan. Mahasiswa menganggap catatan refleksi sebagai alat yang berguna untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep pendidikan kewarganegaraan

Krisis pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pentingnya proses pembangunan karakter bangsa, terutama karakter demokratis, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik kerap kali muncul

sebagai isu-isu segar di Indonesia, seperti sikap primordial, chauvinisme, dan lainnya. Permasalahan karakter merupakan isu yang tengah dihadapi oleh pemuda-pemudi di Indonesia, sehingga perlu dilaksanakan strategi yang efektif sebagai upaya preventif dan represif dari terhadap suatu konflik. Perkembangan pendidikan warganegaraan di Indonesia sangat dinamis, dengan berbagai substansi yang diajarkan kepada siswa terus berubah. Pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai solusi dalam pembangunan karakter, hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan mengembangkan tiga kompetensi utama kepada siswa: pengetahuan, keterampilan, dan karakter menjadi seorang warganegara (Widiatmaka, 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bertujuan diajarkan sebagai sarana dalam menciptakan warga negara yang patuh pada negara saja, tetapi diajarkan tentang bagaimana seorang warga negara dapat bersikap saling menghargai dan mandiri dalam melaksanakan segala kegiatan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mempersiapkan generasi muda agar mereka dapat mengambil peran dan bertanggung jawab sebagai warga negara di masa depan (Aulia & Dewi, 2021).

*Civic Education* secara seimbang tentu akan melakukan pengintegrasian elemen-elemen pendidikan seperti peserta didik diajak belajar sejarah, pemahaman konsep kepahlawanan, cinta tanah air, mampu berkorban demi negara dan memiliki akal budi yang luhur dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan di Indonesia. Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa beberapa generasi muda telah menerapkan beragam karakter yang penting bagi pembangunan masyarakat. Dengan menunjukkan kesetiaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi, disiplin, bertanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis. Implementasi karakter-karakter ini adalah cermin dari kesadaran dan komitmen generasi muda untuk menjadi bagian yang aktif dan positif dalam proses pembentukan masa depan yang cerah bagi masyarakat dan bangsa (Vandita & Taufik, 2023).

Pengembangan karakter di Indonesia, juga harus memperhatikan sembilan pilar yang seharusnya ditanamkan pada generasi muda.

Pilar-pilar tersebut meliputi rasa syukur terhadap Tuhan, tanggung jawab, tepat waktu, mandiri, kejujuran, sopan santun, kasih sayang, kepedulian, kerja sama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, tekun, adil, memiliki jiwa *leadership*, rendah hati, dan saling menghargai dalam persatuan. Jika kesembilan pilar ini dapat diajarkan dan diterapkan dengan baik, sehingga pendidikan karakter dapat dipahami sebagai rencana dalam membentuk manusia menjadi baik. Kepercayaan dalam menjalankan tindakan yang berlandaskan nilai-nilai moral yang tercantum dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki potensi untuk membentuk sebuah masyarakat yang memiliki karakter baik (Aulia & Dewi, 2021).

Pelajaran PKn diajarkan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga perkuliahan, hal ini tentu memiliki tujuan untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif dalam konteks negara, serta menanamkan tanggung jawab dan semangat nasionalisme yang aktif, hal ini ditujukan untuk membangun identitas nasional yang mampu mengamalkan nilai-nilai budaya Pancasila yang mengutamakan kesatuan, keagamaan, dan kemanusiaan (Varelaswi, 2023).

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mengkonstruksi karakter siswa untuk mencapai keadaan damai di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan juga mengandung beberapa ajaran terkait pendidikan karakter, tujuan daripada pendidikan karakter adalah membentuk moralitas yang melibatkan pemahaman, perasaan, dan tindakan. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh pendidik atau guru untuk mendukung aspek-aspek karakter cinta damai, termasuk mengubah lingkungan belajar menjadi lebih positif, memasang poster anti-kekerasan di area sekolah, mempererat persahabatan di antara siswa, menghentikan perilaku bullying, dan menerapkan aturan yang tegas terhadap perilaku kekerasan serta pelecehan di lingkungan sekolah (Jannah dkk., 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi bagian penting dari susunan kurikulum pendidikan di Indonesia, diajarkan di semua lini pendidikan, peran PKn sangat krusial dalam upaya mempersiapkan generasi mendatang dengan pemahaman mendalam tentang berbagai

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang diberikan dalam mata pelajaran PKn mencakup beragam topik, seperti konstitusi, sistem pemerintahan, kebijakan publik, hak asasi manusia, hukum dan peradilan, pluralitas, toleransi, hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab sosial lainnya. PKn memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur hukum dan pemerintahan negara, serta cara kerja sistem politik dan pemerintahan dengan bijaksana. (Rachmawaty, 2023).

Proses penerapan konsep warganegara dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Pelaksanaan pendidikan karakter di era globalisasi dapat menjadi solusi beragam kewarganegaraan di sekolah dasar. Pemahaman dan kesadaran akan negara, sikap dan perilaku cinta tanah air, toleransi, wawasan kebangsaan, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup juga merupakan tujuan dari pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (Hasanah dkk., 2022).

Pancasila menjadi salah satu landasan filosofis dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan, termasuk dalam situasi pasca konflik, pasalnya nilai-nilai pancasila mengandung nilai-nilai ideologis yang menuju pada prinsip toleransi, prinsip persatuan bangsa, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah dan prinsip kebersamaan yang menjadikan penerapan nilai-nilai pancasila wajib dilaksanakan dalam upaya membentuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai rekonsiliasi, dalam arti pancasila dapat menjadikan suasana negara menjadi damai, sejahtera, tentram, rukun sejahtera dan adil (Gole & Marianta, 2024).

Nilai-nilai kewarganegaraan global juga menjadi salah satu hal yang penting dalam melakukan resolusi pasca konflik, indikator dalam melakukan resolusi konflik berasal dari pencapaian dimensi kultur-sosial masyarakat mulai dari menghargai budaya, bertanggung jawab terhadap nilai sosial, wawasan global masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang mendukung pembentukan nilai-nilai warga negara yang bertanggung jawab (Sytrisno dkk., 2021).

**Gambaran  
Kewarganegaraan di Dunia**

**Pendidikan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang penting di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun konten dan pendekatannya dapat bervariasi sesuai dengan budaya, nilai, dan kebijakan masing-masing negara, tujuannya tetap sama: untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif secara politik, dan peduli terhadap masyarakat dan negara mereka. Di beberapa negara, PKn diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah dengan fokus pada pengetahuan tentang sistem politik, sejarah, dan nilai-nilai demokrasi. Sementara di negara lain, nilai-nilai kewarganegaraan termasuk dalam kurikulum secara terintegrasi melalui mata pelajaran lain seperti sejarah atau studi sosial.

Berikut merupakan beberapa analisis anotasi terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan atau civic education di berbagai negara:

Tabel 2. Anotasi Jurnal Gambaran Pendidikan Kewarganegaraan di Dunia

No	Identitas Jurnal
1.	(Benavot dkk., 2024). Should we not be educating for resilience? Leveraging SDG4 in times of crisis. <i>International Journal of Educational Development</i> , 104, 1–7.
2.	(Sold dkk., 2024). Arab mothers' viewpoints: Why their children are removed from home. <i>Child Abuse and Neglect</i> , 152, 1–13.
3.	(Nagle, 2024). Bridging capital after civil war? Protest, acts of citizenship and public space in Beirut. <i>International Journal of Disaster Risk Reduction</i> , 100, 1–12.
4.	(Turhan Damar dkk., 2024). Religious attitude and sense of citizenship effect on organ donation in nursing students: A cross-sectional study. <i>Nurse Education in Practice</i> , 76, 1–7.
5.	(Ciro dkk., 2024). Peace and reparations in legal drug markets in Colombia. <i>Futures</i> , 157, 1–12.
6.	(Viga & Refstie, 2024). Unsettling humanitarian binaries: Civic humanitarianism and relational aid among South Sudanese refugees in Uganda. <i>Geoforum</i> , 150, 1–10.
7.	(Graf dkk., 2024). Classroom emotions in civic education: A multilevel

approach to antecedents and effects. *Learning and Instruction*, 90, 1–11.

8. (Fauziah, 2019). Civic Education di Negara Korea Selatan dan Inggris. *Jurnal Foundasia*, 10(2), 64–78.
9. (Fahmi dkk., 2024). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Ditinjau dari Konsep dan Permasalahan Global. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 24(1), 1–10.
10. (Prayogi dkk., 2023). Kajian Perbandingan Civic Education di Eropa dan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2342–2355.

Pendidikan kewarganegaraan yang dibahas dalam berbagai forum negara berkaitan dengan ketahanan disebutkan berkali-kali dalam 169 target tahun 2030. Ketahanan terutama dipahami dalam hubungannya dengan mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana alam dan meningkatkan pengelolaan planet bumi sumber daya alam seperti ekosistem laut dan pesisir. Berbagai tujuan pengentasan kemiskinan mencerminkan tujuan PBB yang lebih luas pemahaman tentang ketahanan: “Pada tahun 2030 membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka

Kemampuan terhadap peristiwa ekstrem terkait iklim serta guncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya.” Selain mengembangkan ketahanan dampak terhadap kejadian iklim ekstrem dan bencana alam, target ini adalah menekankan nilai ketahanan masyarakat miskin dan rentan di menghadapi guncangan ekonomi dan sosial (Benavot dkk., 2024).

Berbagai kecemasan orang tua terkait adanya konflik di Arab juga berdampak pada peran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah adanya konflik. Berbagai studi menyoroti faktor-faktor kompleks yang mendorong pemindahan anak-anak dari rumah mereka, berdasarkan perspektif Arab ibu-ibu di Yerusalem Timur. Alasan-alasan ini termasuk maraknya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian menyebabkan ketidakmampuan ibu untuk melakukan hal tersebut membesarkan anak-anak mereka, terkadang karena norma budaya; kesulitan ekonomi pasca perceraian;

masalah perilaku anak. Mereka menyadari kurangnya dukungan yang diterima masyarakat; seperti yang kami tunjukkan, bantuan keuangan dan konkrit yang komprehensif membesarkan anak-anak mereka, dapat memungkinkan para perempuan ini menerima, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, sebuah kesempatan nyata untuk membangun sebuah keluarga yang bermanfaat.

Pemberian dukungan keuangan oleh negara dalam membesarkan anak-anak mereka dapat memberikan para perempuan ini kesempatan yang nyata untuk membangun lingkungan keluarga. Sumber daya tersebut sangat penting dalam memungkinkan mereka mengatasi hambatan sistemik yang umum terjadi kelompok yang terpinggirkan dan tertindas, dan khususnya di kalangan perempuan di Yerusalem Timur. Mereka dapat membantu para wanita ini memenuhi kebutuhan mereka anak-anak dengan kebutuhan nyata serta lebih siap secara emosional untuk mereka (Sold dkk., 2024).

Kondisi peperangan yang terjadi di Beirut juga memerlukan peran modal sosial dalam membantu masyarakat dan komunitas pulih dari dan membangun ketahanan terhadap efek bencana ditekankan oleh sejumlah studi. Modal sosial membantu kelompok-kelompok dalam melakukan pembangunan kepercayaan dan jaringan kerja sama untuk secara kolektif menghadapi konsekuensi bencana dan keadaan darurat. Namun, bencana memiliki banyak bentuk, mulai dari gempa bumi dan banjir hingga kekeringan dan badai. Konflik intrastate merupakan jenis bencana yang sangat spesifik – konflik bersenjata sering terjadi di sepanjang garis komunal dan kekerasan meninggalkan sebuah warisan panjang ketidakpercayaan antar kelompok yang berarti permusuhan lebih dominan daripada kerja sama antar kelompok. Modal sosial, dalam lingkungan seperti itu, menguatkan jaringan, identitas, dan ikatan intrakomunal dengan mengecualikan hubungan yang menyatukan komunitas di seberang perpecahan, sehingga penting untuk dilakukan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu modal sosialnya (Nagle, 2024).

Peran pendidikan agama juga penting diinternalisasi pendidikan kewarganegaraan dalam menamakan nilai luhur bangsa, terdapat variasi dalam pembentukan identitas di antara individu dalam suatu masyarakat, yang

memengaruhi rasa kewarganegaraan, persepsi terhadap demokrasi, dan partisipasi sosial mereka. Individu yang memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap orang lain dan lebih menerima perbedaan juga lebih sadar akan kepribadian mereka sendiri, memiliki tingkat ketelitian dan sensitivitas moral serta etika yang lebih tinggi, memiliki keterampilan empati yang lebih baik, dan lebih sadar akan tanggung jawab mereka. Individu yang menerima perbedaan memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk peduli, memiliki keterampilan empati yang lebih baik, kurang mengkhawatirkan penerima organ, dan memiliki rasa kesadaran yang lebih tinggi (Turhan Damar dkk., 2024).

Kegagalan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang terjadi di Kolombia telah menimbulkan Stigmatisasi dan penganiayaan terus-menerus terhadap berbagai kelompok, ini merupakan ekspresi kekerasan yang terus berlanjut di Kolombia, yang merusak dan mengancam proses keadilan transisi dan kemungkinan perdamaian di negara tersebut. Penanaman nilai negara yang salah tentu berdampak pada sebuah kerugian, salah satunya disebabkan oleh narkoba dan kebijakan narkoba, dan akan menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari selama 'perang melawan narkoba' tetap berlangsung. Penting bagi proses keadilan transisi di Kolombia untuk memberikan perhatian lebih pada kebijakan narkoba dan mengakui kedua kelompok ini sebagai korban (Turhan Damar dkk., 2024).

Hal ini memerlukan penyesuaian normatif termasuk: perubahan dalam kebijakan kriminal yang mempertimbangkan kerentanan korban yang terlibat dalam pasar narkoba ilegal; pengakuan dan akuntabilitas terhadap mereka yang benar-benar mendapat manfaat dari mempertahankan kebijakan prohibisionis dan strategi militerisasi; partisipasi penuh komunitas Kolombia dalam desain dan implementasi kebijakan narkoba baru yang memprioritaskan hak asasi manusia di atas strategi interdiksi; dan tidak terulangnya kekerasan, yang menyiratkan paradigma kebijakan narkoba baru yang dikembangkan seputar regulasi hukum yang bertujuan untuk menghilangkan kekerasan dan eksploitasi dari pasar (Ciro dkk., 2024).

Studi lain di daerah konflik seperti daerah Sudan-Uganda memberikan

pembelajaran kewarganegaraan dengan memasukkan unsur-unsur geografi kewilayahan dan aktif dalam forum ketidaksetaraan dan tidakadilan dan evaluasi praktik kemanusiaan dan hubungan antara faktor spasial dan kemanusiaan yang ada didalam kehidupan sehari-hari disertai dengan teori yang berkembang dalam studi kewarganegaraan (Viga & Refstie, 2024).

Gambaran lain terkait penerapan pendidikan kewarganegaraan juga dicontohkan oleh Austria, dimana mereka sumbangsih terhadap ide implementasi kelas pengembangan terbuka dan pendidikan politik sebagai sebuah gagasan unik yang dikembangkan di Austria, kelas pengembangan ini ditujukan agar peserta didik mampu memberikan pemikiran dan terlibat aktif dalam menemukan solusi permasalahan kewarganegaraan dengan menghadirkani isu sosial yang ada dikehidupan sehari-hari, selain itu mereka juga dibekali tentang pengetahuan politik, pengetahuan ini ditujukan agar peserta didik juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara (Graf dkk., 2024).

Pendidikan kewarganegaraan juga dilaksanakan diberbagai negara dengan masing-masing pengalaman dan ide, seperti yang dilakukan di negara Korea Selatan dan Inggris, dimana Korea Selatan memasukkan nomenclature pendidikan moral dalam kurikulum-nya, dengan memasukkan aspek landasan teoritis-kognitif, komunitas berkembang, dasar-dasar norma moral, nilai-nilai kebajikan yang diajarkan didalam agama mereka, sedangkan di Inggris mereka diajarkan terkait identitas nasional, identitas ini dibentuk dengan pemahaman akan kesamaan kebangsaan, kesamaan jati diri, penekanan bahasa nasional dan penerapannya dalam tindakan kelompok (Fauziah, 2019).

Perkembangan penerapan pendidikan kewarganegaraan di Asia-Pasifik difokuskan pada 7 aspek penting, seperti; 1) modernitas global yang mendukung adanya kesetaraan, 2) persamaan cita-cita bangsa terhadap warganegara, 3) stratifikasi masyarakat kewarganegaraan yang dianggap berbeda, 4) fungsi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri terutama dalam penyelesaian konflik, 5) pembentukan kurikulum kewarganegaraan yang digagas oleh berbagai negara di Asia-Pasifik, 6) peran guru dalam mengelola pendidikan

kewarganegaraan, 7) respon pengembangan pendidikan kewarganegaraan terutama dilingkungan pendidikan tinggi sebagai faktor penting untuk melakukan penelitian dan pembaharuan ide dalam pendidikan kewarganegaraan (Fahmi dkk., 2024).

Peran pendidikan kewarganegaraan di Belanda juga dianggap sebagai sebuah hal yang penting untuk dilaksanakan, semua sekolah di Belanda diwajibkan untuk mendukung gerakan menuju warga negara yang baik dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pembelajarannya, selain itu pengingrasian nilai-nilai demokratis juga menjadi hal yang diharuskan pemerintah belanda untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan (Prayogi dkk., 2023).

Pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan dalam sebuah negara tidak dapat diremehkan. Nilai-nilai ini membentuk fondasi moral dan etika masyarakat, membangun solidaritas dan rasa memiliki yang mendalam di antara warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif membantu menumbuhkan generasi yang sadar akan pemenuhan hak dan kewajiban mereka, serta memiliki partisipasi aktif dalam proses demokratis. Melalui proses pemahaman dan pelaksanaan nilai kewarganegaraan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks global yang terus berkembang dan penuh tantangan, penguatan nilai-nilai kewarganegaraan menjadi kunci utama untuk membentuk sikap nasionalisme dalam pembelajaran dari situasi pasca konflik.

Pembelajaran pasca konflik berfokus pada pentingnya rekonsiliasi, penguatan rasa saling percaya, dan pemberdayaan komunitas untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Pengalaman dari masa konflik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat mekanisme resolusi konflik.

## SIMPULAN

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan memiliki signifikansi yang sangat besar dalam konteks pembangunan sebuah negara. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar materi pelajaran di sekolah, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menanamkan

nilai-nilai kemanusiaan dan luhur kepada generasi muda.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diajarkan untuk memahami proses pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini ditujukan agar menjadi warga negara baik serta sadar akan tanggung jawabnya. Lebih dari itu, implementasi pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk kesadaran akan pentingnya toleransi, kerjasama, dan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, implementasi pendidikan kewarganegaraan menjadi sebuah langkah strategis dalam membangun masyarakat yang beradab, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Gambaran dari kegagalan fungsi pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara membawa implikasi yang serius terhadap pembangunan dan stabilitas sosial, ketika peran pendidikan kewarganegaraan tidak berfungsi dengan baik, masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai tantangan dan konflik internal. Kurangnya pengetahuan akan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara, minimnya kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerjasama antar anggota masyarakat tentu dapat mengakibatkan polarisasi dan disintegrasi sosial. Negara-negara yang mengalami kegagalan pendidikan kewarganegaraan seperti Israel-Palestina, Yaman dan negara berkonflik lainnya cenderung menghadapi tantangan untuk pembangunan identitas nasional yang kuat dan bersatu. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap kegagalan fungsi pendidikan kewarganegaraan menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan kemajuan sebuah negara.

Saran penelitian lanjutan bisa melakukan penelitian terkait strategi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan sebagai proses kritis dengan melibatkan isu dan permasalahan sosial sebagai sumber belajar pendidikan kewarganegaraan, terutama sebagai upaya dalam penanganan krisis dari adanya sebuah konflik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A dan Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah “Kajian Kritis

PKn” yang selalu membimbing dan memberikan pengarahan terkait penulisan artikel ini, selanjutnya kepada FISIPOL UNESA yang telah memberikan ruang untuk senantiasa berkarya mengembangkan keilmuan yang saya dalam yakni beriatan dengan Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. I., Nurlim, R., Asnaniar, W. O. S., Alam, R. I., Padhila, N. I., Ernasari, E., & Ramli, R. (2023). *Studi Literatur (Systematic, Narative, Scoping, Argumentative, Theoretical)*. Eureka Media Aksara.
- Atmaja, J. P., & Salahuddin, M. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Moral Antar Mahasiswa. *Pendidik: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 03(02), 39–44. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendidikas>
- Aulia, S. N., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Generasi Muda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 268–275.
- Benavot, A., Williams, J. H., & Naidoo, J. (2024). Should we not be educating for resilience? Leveraging SDG4 in times of crisis. *International Journal of Educational Development*, 104, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102929>
- Ciro, E., Ryder, M., & Sánchez, S. (2024). Peace and reparations in legal drug markets in Colombia. *Futures*, 157, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2024.103336>
- Dakhi, A. Z. (2023). Analisis Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik bagi Peserta Didik. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1), 421–427. <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>
- Fahmi, R., Latuconsina, H., Djamaludin, D., & Lesmana, S. J. (2024). Perkembangan

- Pendidikan Kewarganegaraan Ditinjau dari Konsep dan Permasalahan Global. *Pelita : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.33592/pelita.v24i1.5080>
- Fauziah, F. (2019). Civic Education di Negara Korea Selatan dan Inggris. *Jurnal Foundasia*, 10(2), 64–78.
- Gole, H., & Marianta, Y. I. W. (2024). Pancasila Sebagai Paradigma Penyelesaian Konflik Pembunuhan Massal Tahun 1966 di Maumere, Flores Timur. *Civic Society Research and Education*, 2, 14–26. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index>.
- Graf, E., Stempfer, L., Muis, K. R., & Goetz, T. (2024). Classroom emotions in civic education: A multilevel approach to antecedents and effects. *Learning and Instruction*, 90, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101869>
- Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina. *JALREV: Jambura Law Review*, 1(2), 167–191. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>
- Harahap, S., Paturochman, I. R., & Lubis, M. (2023). Menanamkan Kritisisme Konstruktif di Perguruan Tinggi: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengelola Tren Kontroversial Mahasiswa. *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 173–181. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i1.3440>
- Hasanah, U., Putri, M. K., Nafsiyah, A. T., Wulandari, W., & Firdaus, I. I. (2022). Kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 1(3), 289–292. <https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.376>
- Imelda Saskia, S. (2023). Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Sikap Nasionalisme Warga Negara. *Jocer: Jurnal of Civic Education Research*, 1(1), 6–10. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer>
- Isa, S. F. P., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Karakter Siswa di Era Globalisasi. *Harmony*, 6(1), 66–71.
- Jannah, A. N., N, P. S., Yahya, R. N., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Sekolah Damai di Tengah-Tengah Kehidupan Masyarakat Pluralis. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5266–5274. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1604>
- Nagle, J. (2024). Bridging capital after civil war? Protest, acts of citizenship and public space in Beirut. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 100, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104199>
- Nato. (2022, July 7). *Crisis Management*. [https://www.Nato.Int/Cps/En/Natohq/Topics\\_49192.Htm](https://www.Nato.Int/Cps/En/Natohq/Topics_49192.Htm).
- Pattipeilhy, S. C. H., & Sitompul, Y. A. C. (2022). Perang Rusia-Ukraina, Gangguan Transportasi Multimoda, dan Kerawanan Rantai Pasokan Pangan Global. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 20(2), 56–68. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>
- Prayogi, R., Komalasari, K., Heru Nurgiansah, T., & Suriaman. (2023). Kajian Perbandingan Civic Education di Eropa dan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2342–2355.
- Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. gede S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Journal Komunikasi Yustisia Universitas*

- Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(2), 243–253.
- Rachmawaty, S. (2023). Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 1(1), 34–42.
- Rahadyan, R., Latupella, G. C., & Setiawati, D. (2024). Dampak Politik Konflik Yaman Tahun 2011. *Jurnal Nirwasita*, 5(1), 7–13.
- Rasyid, M. (2022). Nasib Diaspora Palestina di Kuwait: Antara Rumah Kedua dan Dampak Perang Teluk. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 5(2), 190–198. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH>
- Rifki, A. W. (2022). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa di Sekolah. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 46–51. <https://journal.actual-insight.com/index.php/didactica>
- Sold, A., Refaeli, T., & Omar, N. (2024). Arab mothers' viewpoints: Why their children are removed from home. *Child Abuse and Neglect*, 152, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106793>
- Sudirman, I. N., & Sukasani, G. A. (2024). Membentuk Generasi Emansipasi: Peran Kewarganegaraan dan Kurikulum Merdeka di SD. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 193–197.
- Sytrisno, S., Sapriya, Komalasari, K., & Rahmat. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 43–54. <https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n1.2021.p25-34>
- Turhan Damar, H., Ordin, Y. S., & Erkin, Ö. (2024). Religious attitude and sense of citizenship effect on organ donation in nursing students: A cross-sectional study. *Nurse Education in Practice*, 76, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103937>
- Vandita, L. Y., & Taufik, A. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Generasi Muda. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 290–297. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i2.900>
- Varelasawi, R. S. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai penanaman Pendidikan Karakter Siswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme. *Proceedings Series of Educational Studies National Conference from Magister of Education Management*, 5, 153–160.
- Viga, E., & Refstie, H. (2024). Unsettling humanitarian binaries: Civic humanitarianism and relational aid among South Sudanese refugees in Uganda. *Geoforum*, 150, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.103974>
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di dalam membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.*, 5(1), 1–10.